

**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan :

1. Laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan catatan informasi keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

d) **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyajikan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyajikan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyajikan informasi mengenai bagaimana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun, terkait dengan

sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pelaporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sarolangun Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah No 09 tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.
18. Peraturan Daerah No 05 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No 09 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021
19. Peraturan Bupati No 89 tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.
20. Peraturan Bupati No 42 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup No 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah -Perubahan 2021
21. Peraturan Bupati No 27 Tahun 2014 tentang kebijakan pemda Kabupaten Sarolangun.
22. Peraturan Bupati No 66 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati no 27 tahun 2014.
23. Peraturan Bupati No 46 tahun 2014 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sarolangun.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip.

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.1.1 Penjelasan LRA

3.1.2 Belanja

3.1.3 Penjelasan Pos- Pos Laporan Operasional

3.1.4 Beban

3.1.5. Aset

3.1.6 Kewajiban

3.1.7 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

4.1 Informasi dan Non Keuangan

4.2 Informasi Keuangan Non APBD

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 8.176.566.704,- sampai keadaan per 30 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 7.665.256.239,- atau 93,75% dari anggaran. Secara umum realisasi belanja yang kurang 6,25 % dari anggaran menunjukkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat mencapai efisiensi disektor belanja daerah, baik melalui penghematan anggaran dari pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan, ataupun melalui pengendalian anggaran. Untuk lebih jelasnya ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja belanja daerah ini disajikan dalam tabel berikut:

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	4.802.748.697	4.634.831.725	93,75
1	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	170.400.000	170.400.000	100
2.	Pengelolaan dan pengembangan bahan Pustaka	23.290.000	23.285.113	99,98
3.	Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan pendidikan Khusus serta masyarakat	50.612.613	50.458.499	99,70
4.	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana perpustakaan di tempat tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	4.500.000.000	4.332.242.029	96,27
5.	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	23.339.622	23.339.622	100
6.	Pengembangan Literasi berbasis inklusi social	35.106.462.	35.106.462	

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
II.	Program Pengelolaan Arsip	40.510.782	38.769.595	95,70
1.	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	24.999.694	24.966.257	99,87
2.	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	2.700.000	2.657.265	98,42

3.	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	9.203.748	7.538.733	81,91
4.	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	3.607.340	3.607.340	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
III	Program Perlindungan dan penyelamatan arsip	65.047.687	64.835.204	99,67
1	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	33.192.033	33.129.950	99,81
2	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah kabupaten/kota	31.855.654	31.705.254	99,53

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
IV	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	3.268.259.538	2.927.278.839	89,57
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	28.469.721	28.450.997	99,93
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	18.540.008	18.332.315	98,88
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.379.125.599	2.057.735.740	86,49
4	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	24.971.522	24.971.522	100
5	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	29.062.000	27.142.100	93,39
6	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	4.997.834	4.997.579	99,99
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.468.596	15.468.596	100
8	Penyediaan bahan logistic kantor	52.437.509	52.351.178	99,84
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.992.239	12.992.087	100
10	Fasilitasi Kunjungan tamu	14.080.000	14.079.230	99,99
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	101.342.000	101.342.000	100
12	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	25.150.510	24.930.500	99,13
13	Penyediaan jasa surat menyurat	1.400.000	1.372.800	98,06
14	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	91.102.000	77.614.010	85,19
15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	407.420.000	404.420.000	99,26
16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	50.940.000	50.318.185	98,78
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.760.000	10.760.000	100
JUMLAH		8.176.566.704	7.665.256.230	93,75

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Terbatasnya SDM Aparatur.
2. Belum terkristalisasinya juknis yang baku dalam proses pencairan anggaran.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

- Belanja Operasi

TA 2021	TA 2020
Rp3.308.083.710	Rp. 3.704.018.998

Anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2021 Rp. 3.651.416.194 dengan realisasi 3.308.083.710 atau sebesar 90,60%. Realisasi belanja tahun 2021 menurun sebesar Rp.52.602.04, dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 3.704.018.998. belanja Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- Belanja Pegawai

TA 2021	TA 2020
Rp. 2.255.696.616	Rp. 2.191.216.587

Anggaran belanja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2021 Rp. 2.577.545.599 dengan realisasi 2.255.696.616 atau sebesar 87,51%. Realisasi belanja tahun 2021 meningkat sebesar Rp.64.480.8029, dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 2.191.216.587.

Tabel. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
Belanja			
Belanja Operasi	3.651.416.194	3.308.083.710	90,60
Belanja Pegawai	2.577.545.599	2.255.696.616	87,51
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.379.125.599,00	2.057.276.616,00	86,47
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.218.997.699,00	1.120.165.116	91,89

Tunjangan Keluarga	113.810.340,00	108.599.104,00	95,42
Tunjangan Jabatan	180.921.300,00	145.450.000,00	80,39
Tunjangan Jabatan Fungsional	60.715.000,00	26.160.000,00	43,09
Tunjangan Jabatan Fungsional Umum	23.331.000,00	13.040.000,00	55,89
Tunjangan Beras	71.681.316,00	67.495.440,00	94,16
Tunjangan PPH/Khusus	3.569.580,00	3.419.933,00	95,81
Pembulatan Gaji	20.440,00	13.978,00	68,39
Iuran Jaminan Kesehatan	132.921.583,00	68.500.688,00	51,53
Tunjangan Kecelakaan	3.012.478,00	2.287.754,00	75,94
Tunjangan Kematian	9.037.532,00	6.838.543,00	75,67
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	172.914.003,00	156.621.205,00	90,58
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	128.822.319,00	110.115.575,00	85,48
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja PNS	259.371.009,00	228.569.280,00	88,12
Belanja Honorarium Peanggung Jawab Pengelola Keuangan	198.420.000,00	198.420.000,00	100

• Belanja Barang dan Jasa

TA 2021

Rp. 1.052.387.094

TA 2020

Rp. 1.512.802.411

Anggaran belanja Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2021 Rp. 1.073. 870.595 dengan realisasi 1.052.387.094 atau sebesar 98%. Menurun jika dibandingkan dengan Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp.460.415.317, dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 1.512.802.411.

- Belanja Modal

TA 2021

Rp. 4.357.172.529

TA 2020

Rp. 9.995.000

Anggaran belanja Modal Dinas ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021 Rp. 4.525.150.510 dengan realisasi Rp. 4.357.172.529,- atau 96,29 %, belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin Rp. 24.930.500 dan belanja modal Gedung dan bangunan Rp. 4.332.242.092

3.1.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Aset diklasifikasikan pada aset lancar dan aset tetap, nilai aset Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.11.209.667,13 Diuraikan dalam tabel berikut ini.

Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.	Aset Lancar	6.760.378	7.445.550,00
2.	Aset Tetap	6.111.449.289,13	2.437.044.891,57
3.	Aset Lainnya	0	3.600.000,00
	Jumlah	6.118.209.667,13	2.448.090.441,57

❖ Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari beban jasa dibayar dimuka dan persediaan alat tulis kantor nilai aset lancar per 30 Desember 2021 sebesar Rp. 6.760.378 ; turun sebesar Rp.685.172; dibandingkan nilai per 31 Desember 2020 Rp 7.445.550,00. Rincian aset lancar per 31 Desember 2020 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rincian Aset Lancar per 30 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Aset	30 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Beban jasa dibayar dimuka	6.345.450,00	6.749.550,00
2	Persediaan bahan pakai habis	414.928.00	696.000.00
	Jumlah	6.760.378.00	7.445.550.00

1.1 Beban Jasa dibayar dimuka

Beban jasa dibayar dimuka per desember 2021 adalah sebesar Rp. 6.345.450,00,- yang terdiri dari pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 sebesar Rp.3.500.000,- dan pajak kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebesar Rp.2.501.283,00; Beban jasa ini dibayar ditahun 2020 yang manfaatnya berakhir pada tahun 2021.

1.2 Persediaan Bahan Pakai Habis

Nilai persediaan bahan pakai habis per desember 2021 sebesar Rp. 414.928.00; yang terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 216.928,- dan persediaan kertas/cover Rp. 198.000 turun sebesar Rp. 281.072 dibandingkan per 31 desember 2020 sebesar Rp. 696.000; Nilai persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 414.928.00; Merupakan saldo persediaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah per 30 Desember 2022.

❖ Aset Tetap

Nilai aset tetap per 30 desember 2021 sebesar Rp.6.111.449.289,13,- Merupakan akumulasi nilai aset tetap per 30 Desember 2020, koreksi dan reklasifikasi serta depresiasi (penyusutan), selain itu perolehan aset tetap atas beban APBD menggunakan prinsip capitalization (thresholds). Nilai aset tetap per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 2.437.044.891,57,- Meningkatkan sebesar Rp.; 3.674.404.398,44-Dibandingkan dengan aset tetap per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 2.437.044.891,57,-

Tabel 4.3 Daftar Aset Tetap

No	Jenis Aset	30 Desember 2021	30 Desember 2020
1.	Peralatan dan Mesin	2.237.658.090,00	2.212.727.590,00
2.	Gedung dan Bangunan	4.474.437.029,00	618.444.000,00
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	44.495.000,00	44.495.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya	1.048.008.640,00	1.048.008.640,00
5.	Akumulasi Penyusutan	(1.830.649.469,87)	(1.716.275.338,43)
	Jumlah	6.111.449.289,13	4.547.446.920

❖ Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan hutang akan listrik PDAM dan Telponinternet nilai kewajiban jangka pendek per 30 desember 2021 Rp.4.878.853,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.517.370,00 dari tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penunggakan pembayaran listrik bulan Desember Rp. 3.354.594, PDAM Rp. 402.800,00 dan Jasa Internet Kantor Rp. 1.562.779,00.

❖ Ekuitas

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Daerah dengan cara menghitung selisih antar aset dan kewajiban. Saldo ekuitas per desember 2021 Rp.6.113.530.814,-

3.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 desember 2021 sebesar Rp.0,00; Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.3.574.519.372,44,- yang terdiri dari Beban Pegawai Rp. 2.255.696.616, beban hutang dan jasa Rp. 1.054.589.645,- dan sedangkan terdapat defisit kegiatan operasional Rp.(3.574.519.372,44). Kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp.0,00; sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp.0,-;

Rincian Laporan Operasional 30 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	30 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Beban	3.574.519.372,44	3.930.474.262,86
2	Beban Pegawai	2.255.696.616	2.191.216.587
3	Beban hutang dan jasa	1.054.589.645	1.512.364.605
4	Surplus /Defisit-LO	(3.574.519.372,44)	(3.930.474.262,86)

3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp.2.444.828.967,57; ditambah surplus/Defisit_LO sebesar Rp.(3.574.519.372,44), Koreksi Ekuitas sebesar Rp.(422.135.020), Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Rp. 7.665.256.239 sehingga jumlah ekuitas akhir pada tanggal 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp.6.113.330.814,13,-

Rincian Perubahan Ekuitas 30 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	30 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Ekuitas Awal	2.444.728.967,57	2.641.444.232,43
2	Surplus/deficit -LO	(3.574.519.372,44)	(3.930.374.262,86)
3	Koreksi ekuitas	422.135.020	19.745.000
4	Kewajiban untuk di konsolidasikan	7.665.256.239	3.714.013.998
	Ekuitas Akhir	6.113.330.814,13	2.444.728.967,57

3.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN/ KEUANGAN NON APBD DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

4.1 Informasi Non Keuangan

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	: ALI AMRI,SE
Sekretaris Perpustakaan dan Arsip Daerah	: DRS.SYAMSURIJAL
- Kepala Subbagian Umum	: RAHMAWATI
- Kepala Subbagian Keuangan, Aset dan Program	: SUPRIANI,SE
1. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	: ROSDIANA,S.Pd
- Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca	: HARMIYATI,S.AP
- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	: ALEX ISKANDAR,S.HI
- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan	: HERI SETIAWAN,SP.M
2. Kepala Bidang Pengadaan,Pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan	: BAIHAKI,S.Ag,M.Si
- Kepala Seksi Pengadaan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	: ATMO DARMINTOSE : M.ISNAINI,S.Sos
- Kepala Seksi Layanan otomasi kerjasama perpustakaan	: KATRUNADA,SE
- Kepala Seksi Pestaarian Bahan Perpustakaan	
3. Kepala Bidang Pengolahan dan layanan Arsip	: AIDIL FITRI,SE
- Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	: LUCKY SODO,SH
- Kepala Seksi Layanan Informasi dan Jasa Kearsipan	: DESY SIANTY.AMD
- Kepala Seksi Pengolaan,Pembinaan Kearsipan	: AGUS MINARNI,SE

4.2 Informasi Keuangan Non APBD

Dana Alokasi Khusus yang diterima Dinas Perpustakaan dan Arsip Dearah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.4.500.000.000 ,- terealisasi sebesar Rp.4.332.242.029,- atau 96,27 %

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan ini disusun secara sistematis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan tujuan membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui Realisasi Anggaran dan Neraca Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2021.

Adapun Laporan Keuangan ini masih belum sempurna dikarenakan keterbatasan kami untuk memberikan yang terbaik dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik keuangan maupun non keuangan. Dengan demikian diharapkan para pengguna laporan dapat memahami secara komprehensif laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

Di masa-masa mendatang segala kekurangan dan kelemahan pada Catatan Atas Laporan Keuangan ini, akan disempurnakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Sarolangun, Januari 2022
KEPALA DINAS



ALI AMRI,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630209 199003 1 003